



BADAN KEAHLIAN
*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*

PRODIGY

Jurnal Perundang-Undangan

Problematika Hukum mengenai Royalti Lagu/Musik terkait *Performing Rights* dalam Pertunjukan secara Komersial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Olsen Peranto

Analisis Yuridis Efektivitas Penetapan Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Edison Sinaga & Sekarsih Saptanti

Tindak Lanjut Pembentukan Undang-Undang terhadap Putusan *Limited Constitutional* dari Mahkamah Konstitusi

Ihsan Badruni Nasution

Arah Pembangunan Nasional Jangka Panjang Bidang Hukum (Analisis Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045)

Khopiatuziadah

Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi

Laily Fitriani

Kebijakan Pembatasan Kepemilikan Rumah untuk Keadilan Masyarakat

Laksmi Harundani

Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah Tidak Langsung Dalam Perubahan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah

Hendra Martadiredja

Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Imaduddin

Urgensi Perubahan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Melakukan Penyesuaian dengan Perkembangan Hukum dan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan

Imron Razali

Analisis Yuridis Pemenuhan dan Perlindungan Hak Orang Lanjut Usia

Dyah Pitaloka

Memahami Kausalitas Hukum dan Politik Pada Kasus Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Rizky Ahadyan Ardyansyah & Saiful Rizal

*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*

PRODIGY

Jurnal Perundang-Undangan

Volume 13 Nomor 1 Juli 2025

Alamat
Redaksi Prodigy Jurnal Perundang-Undangan
Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI
Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI
Jalan Gatot Subroto, Jakarta Kode Pos 10270
e-mail: prodigyjurnalilmiah@gmail.com dan jurnal.prodigy@dpr.go.id

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab	: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
Pemimpin Redaksi / Redaktur	: Dr. Laily Fitriani, S.H., M.H.
Editor	: Nita Ariyulinda, S.H., M.H. Yeni Handayani, S.H., M.H. Arrista Trimaya, S.H., M.H. Woro Wulaningrum, S.H., M.H. R. Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn Achmadudin Rajab, S.H., M.H. Sutriyanti, S.H., M.H. Muhammad Yusuf, S.H., M.H. Olsen Peranto, S.H. Aryudhi Permadi, S.H., M.H. Noval Ali Muchtar, S.H. M.H. Mohammad Gadmon Kaisar, S.H., M.H.
Mitra Bestari	: Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. Prof. Alfitri, S.Ag., M.Ag., LL.M., PhD. Dr. E. Fernando, M. Manullang, S.H, M.H. Dr. Henny Marlina, S.H., M.H., M.L.I.
Desain Grafis	: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T. Santoso Wahyu Nugroho Rafli Fadilah Muhammad, S.H. Rona Jinan Zahro, S.H
Sekretariat	: Intan Pujakesuma, S.E., M.AP. Debora Cahyaningati, A.Md.A.B Atika Novitasari, A.Md. Ak.

Daftar Isi

PROBLEMATIKA HUKUM MENGENAI ROYALTI LAGU/MUSIK TERKAIT <i>PERFORMING RIGHTS</i> DALAM PERTUNJUKAN SECARA KOMERSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	1
ANALISIS YURIDIS EFEKTIVITAS PENETAPAN CAGAR BUDAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA	27
TINDAK LANJUT PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TERHADAP PUTUSAN <i>LIMITED CONSTITUTIONAL</i> DARI MAHKAMAH KONSTITUSI	45
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL JANGKA PANJANG BIDANG HUKUM (ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2025—2045)	67
KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGAWASAN TERHADAP HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI	93
KEBIJAKAN PEMBATASAN KEPEMILIKAN RUMAH UNTUK KEADILAN MASYARAKAT	115
KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TIDAK LANGSUNG DALAM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH	137
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN	159
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DENGAN MELAKUKAN PENYESUAIAN DENGAN PERKEMBANGAN HUKUM DAN UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	183
ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ORANG LANJUT USIA	203
MEMAHAMI KAUSALITAS HUKUM DAN POLITIK PADA KASUS PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA	225

Pengantar Redaksi

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya, sehingga Redaksi dapat menerbitkan Jurnal Perundang-undangan “Prodigy” Volume 13 Nomor 1, Juli 2025. Jurnal ini memuat topik bahasan di bidang hukum dan perundang-undangan yang merupakan hasil kajian lebih lanjut maupun elaborasi dari suatu naskah akademik dan rancangan undang-undang, analisis dari suatu peraturan perundang-undangan, kajian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kajian atas peristiwa hukum yang terjadi, kajian dan teori dari konsepsi hukum, serta gagasan dan analisis terhadap fungsi legislasi.

Dalam penerbitan ini, setiap tulisan telah melalui proses pembahasan dan penyuntingan oleh Redaksi dan telah dilakukan tinjauan secara menyeluruh oleh pembaca ahli (mitra bestari). Keseluruhan tulisan yang disajikan memuat 12 (dua belas) tulisan yang substansinya mencakup permasalahan hukum dan perundang-undangan di bidang politik, hukum, kesejahteraan sosial, ekonomi, serta industri dan pembangunan.

Keseluruhan tulisan yang disajikan dalam jurnal ini meliputi 12 (dua belas) tulisan dengan berbagai tema sebagai berikut: Kesatu, Problematika Hukum Mengenai Royalti Lagu/Musik Terkait *Performing Right* Dalam Suatu Pertunjukan Komersial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Kedua, Analisis yuridis efektivitas penetapan cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; Ketiga, Tindak Lanjut Pembentukan Undang-Undang Terhadap Putusan *Limited Constitutional* dari Mahkamah Konstitusi; Keempat, Arah Pembangunan Nasional Jangka Panjang Bidang Hukum (Analisis Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045); Kelima, Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi; Keenam Kebijakan Pembatasan Kepemilikan Rumah Untuk Keadilan Masyarakat.

Selanjutnya Ketujuh, Kebijakan pemilihan kepala daerah tidak langsung dalam perubahan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah; Kedelapan, Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; Kesembilan, Urgensi

Perubahan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha negara dengan melakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum dan undang-undang tentang administrasi pemerintahan; Kesepuluh, Analisis yuridis pemenuhan dan perlindungan hak orang lanjut usia; dan Kesebelas, Memahami kausalitas hukum dan politik pada kasus penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Redaksi berharap dalam setiap penerbitan Jurnal Perundang-undangan “Prodigy” tulisan yang ditampilkan dapat semakin meningkat kualitasnya baik dari sisi teknik penulisan ilmiah maupun substansi. Tentu saja kelemahan dan kekurangan masih banyak ditemui, tetapi dengan upaya perbaikan yang secara terus-menerus dilakukan optimisme bagi peningkatan kualitas tulisan yang ditampilkan akan semakin lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Jakarta, Juli 2025

Redaksi

**PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

Volume 13 Nomor 1 Juli 2025

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Olsen Peranto

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Keahlian DPR RI

Problematika Hukum mengenai Royalti Lagu/Musik terkait *Performing Rights* dalam Pertunjukan secara Komersial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Jurnal Prodigy, Vol. 13 No. 1 Juli 2025, hal. 1-25

Hukum hak cipta memberi landasan bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait untuk mempertahankan atau mengeksploitasi haknya. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU tentang Hak Cipta) diwarnai banyak tantangan yang melibatkan pelaku industri musik terkait dengan lagu yang digunakan oleh penyanyi dalam pertunjukan secara komersial. *Performing rights* merupakan hak ekonomi bagi pencipta lagu ataupun pemegang hak cipta atas pertunjukan musik karya mereka di depan umum. Dalam sebuah pertunjukan komersial seperti konser terkait dengan penggunaan sebuah lagu/musik maka setidaknya ada beberapa pihak yang saling terkait yaitu penyelenggara acara, penyanyi, pencipta lagu, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah problematika hukum mengenai royalti hak cipta lagu/musik terkait *performing rights* dalam pertunjukan komersial dan bagaimanakah solusi pengaturannya. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada aspek yuridis dengan menelaah norma hukum yang ada. Pengaturan UU tentang Hak Cipta mengenai royalti terkait *performing rights* dalam sebuah pertunjukan komersial masih menimbulkan persoalan yang kompleks, diantaranya yaitu: tidak adanya ketegasan siapa yang disebut sebagai pelaku pertunjukan/pengguna lagu; boleh atau tidaknya menggunakan lagu tanpa izin; serta kepada siapakah royalti harus dibayarkan. Alternatif solusi terhadap persoalan tersebut diantaranya yaitu: dengan menunjuk satu pihak yang wajib membayar royalti dimana lebih tepat untuk dilekatkan kepada penyanyi; mewajibkan pengurusan izin terlebih dahulu sebelum lagu digunakan; penggunaan frasa "royalti" secara konsisten; dan membentuk satu lembaga pemungut royalti ataupun mempertahankan eksistensi LMK/LMKN dengan kejelasan tugas dan fungsinya serta dengan tetap membuka adanya lisensi secara langsung.

Kata Kunci: Royalti, *Performing Rights*, Pertunjukan Secara Komersial, UU tentang Hak- Cipta

Legal Issues Regarding Song/Music Royalties Related to *Performing Rights* on Commercial Show Based on Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright

Prodigy Journal, Vol. 13 No.1, July 2025, Page 1-25

Copyright law provides a basis for creators, copyright holders, and related rights holders to defend or exploit their rights. The implementation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (Copyright Act) is marked by many challenges involving music industry players related to songs used by singers/performers in commercial performances. Performing rights are economic rights for songwriters or copyright holders for the performance of their musical works in public. In a commercial performance such as a concert, there are at least several parties that are interrelated, namely the event organizer, singer, songwriter, copyright holder, and/or related rights owner. This article aims to find out how the legal problems regarding copyright royalties for songs/music related to performing rights in commercial performances are and how the regulatory solutions are. The writing method used is normative juridical. The regulation of the Copyright Act regarding royalties in performing rights in a commercial performance still raises complex issues, including: the lack of clarity on who is referred to as the performer/user of the song; whether or not it is permissible to use the song without permission; and to whom the royalties must be paid. Alternative solutions to these problems include: appointing one party who is required to pay royalties, which is more appropriate to be attached to the singer/performer; requiring prior permission before the song is used; consistent use of the phrase "royalty"; establishing single collective management organization/institution or maintaining the existence of LMK/LMKN with clear duties and functions; and continuing to open up direct licensing.

Keywords: Royalty, *Performing Rights*, Commercial Show, Copyright Act

**PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

Volume 13 Nomor 1 Juli 2025

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Edison Sinaga

Analisis Hukum Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan

Sekarsih Saptanti

Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan

Analisis Yuridis Efektivitas Penetapan Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Jurnal Prodigy, Vol. 13 No. 1 Juli 2025, hal.

Persoalan hukum yang sering terjadi di Indonesia terkait dengan sejarah peradaban dan kebudayaan kuno adalah terkait cagar budaya, khususnya mengenai pelestarian cagar budaya. Suatu objek dikatakan sebagai cagar budaya apabila telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Tahap penetapan inilah yang menjadi kunci pelestarian benda-benda kuno/bersejarah/objek yang diduga cagar budaya, karena pelestarian baru dapat dilakukan pada objek yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini menganalisis: Pertama, bagaimana dampak hukum penetapan cagar budaya terhadap objek budaya? Kedua, bagaimana efektivitas pengaturan penetapan cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya? Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terhadap penetapan Cagar Budaya di Indonesia. Metode penulisan hukum yuridis normatif dengan spesifikasi tulisan deskriptif analitis. Hasil pembahasan menyimpulkan: Pertama, penetapan cagar budaya memiliki dampak hukum terhadap cagar budaya itu sendiri maupun terhadap masyarakat. Dampak hukum penetapan terhadap cagar budaya yaitu adanya kepastian hukum terhadap objek budaya sehingga dapat berlaku perlindungan dan pelestarian objek sebagai cagar budaya berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang tentang Cagar Budaya. Kedua, analisis dilakukan pada setiap proses tahapan penetapan cagar budaya untuk melihat efektivitas pengaturan penetapan cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Kata kunci: efektivitas, penetapan cagar budaya, undang-undang.

Juridical Analysis of The Effectiveness of Determination of Cultural Property Based on Law Number 11 of 2010 Concerning Cultural Property

Prodigy Journal, Vol. 13 No.1, July 2025, Page

Legal issues that often occurred in Indonesia about history of civilization and cultures is cultural property, especially about preservation of cultural property. An object can be called as cultural property if it has been determinate as stated in Article 1 of Act Number 11 of 2010 concerning Cultural Properties. This determination of cultural property is the main point to preserving historical objects/object that are thought to be cultural property because preservation only for objects that have been determinate as cultural property. Based on these problems, this journal analyses: First, how is the law impact of determination of cultural property to cultural objects? Second, how is effectiveness of the regulations of determination of cultural property based on Act Number 11 of 2010 concerning Cultural Properties? This journal purpose to find out the effectiveness of Act Number 11 of 2010 concerning Cultural Properties in determination of cultural property in Indonesia. This journal uses normative legal writing method with analytical descriptive specifications. The results of this journal: First, The determination of cultural property has legal impacts on the cultural property itself and on society. The legal impact of determination of cultural property is that there is legal certainty concerning cultural objects so that the protection and preservation of objects as cultural property can apply based on the provisions of the Law on Cultural Property. Second, Analysis is carried out at each stage of the process of determination cultural property to see the effectiveness of the regulations for determination of cultural property based on Act Number 11 of 2010 concerning Cultural Properties

Keywords: effectiveness, determination of cultural property, law.

**PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

Volume 13 Nomor 1 Juli 2025

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Ihsan Badruni Nasution

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Keahlian DPR RI

Tindak Lanjut Pembentukan Undang-Undang terhadap Putusan *Limited Constitutional* dari Mahkamah Konstitusi

Jurnal Prodigy, Vol. 13 No. 1 Juli 2025, hal.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menunda pemberlakuan putusan (*limited constitutional*) bertujuan untuk memberi transisi terhadap undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu tertentu. Model putusan ini memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk segera melakukan perubahan undang-undang sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dasar dan tujuan Mahkamah Konstitusi menentukan tenggang waktu konstusionalitas undang-undang serta bagaimana pembentuk undang-undang menindaklanjuti putusan tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan, tulisan ini menyimpulkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang sebagian besar telah melakukan tindak lanjut perubahan undang-undang sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan. Namun, terdapat satu putusan yang ditindaklanjuti tidak sesuai dengan tenggang waktunya, yaitu putusan Nomor 15/PUU-XV/2017 yang memerintahkan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang tidak menentukan tenggang waktu perubahan undang-undang secara tegas juga mengakibatkan pembentuk undang-undang menunda dan tidak segera merespon putusan tersebut. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum dan substansi putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu pengaturan yang tegas mengenai inisiator awal pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam daftar kumulatif terbuka Program Legislasi Nasional (Prolegnas), mekanisme pembahasan RUU, dan limitasi jangka waktu pembahasan RUU.

Kata kunci: putusan Mahkamah Konstitusi, pembentukan undang-undang, konstusionalitas.

Legal Issues Regarding Song/Music Royalties Related to Performing Rights on Commercial Show Based on Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright

Prodigy Journal, Vol. 13 No.1, July 2025, Page

The limited constitutional decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia aims to provide a transition for laws that are contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and still have binding force until the specified deadline. This decision ordered the legislators to immediately amend the law following the deadline set by the Constitutional Court. This study aims to understand the basis and intent of the Constitutional Court in deciding limited constitutional decisions as well as legislators responses to implement the decisions of the Constitutional Court. Using the normative juridical method through a literature review, this study found that the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the President as legislators have primarily amended laws following the deadline. However, there was a decision that was not implemented within the deadline, namely Constitutional Court decision Number 15/PUU-XV/2017 that ordered amendment Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution. Then, decision number 97/PUU-XI/2013, which did not stipulate a deadline for amending the laws explicitly, caused legislators to delay and not immediately amend the law. Therefore, to ensure legal certainty and the Constitutional Court's decision can be appropriately implemented, it is necessary to strictly regulate the initiator of the bill by proposing the bill in the open cumulative list in the National Legislation Program (Prolegnas), the mechanism of discussion of the bill, and the limitation of discussion period of the bill.

Keywords: Constitutional Court decision, law making process, constitutionalilty.

**PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

Volume 13 Nomor 1 Juli 2025

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Khopiatuziadah

Perancang Peraturan Peundang-undangan Ahli Madya, Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Keahlian DPR RI

Arah Pembangunan Nasional Jangka Panjang Bidang Hukum (Analisis Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045)

Jurnal Prodigy, Vol. 13 No. 1 Juli 2025, hal.

Terjadi perubahan paradigma, model, dan pendekatan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dibandingkan dengan RPJPN Tahun 2005-2025. Terdapat tantangan terkait perubahan paradigma, model, dan pendekatan perencanaan terutama dalam arah pembangunan hukum. Permasalahan dan tujuan penulisan adalah untuk menganalisis sejauh mana peran evaluasi pembangunan bidang hukum 2005-2025 terhadap penyusunan perencanaan pembangunan hukum dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan apa saja catatan kritis terhadap arah pembangunan hukum dalam RPJPN Tahun 2025-2045 serta solusinya. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dokumen evaluasi pembangunan hukum dalam RPJPN Tahun 2005-2025 menjadi dasar berpijak dalam penyusunan perencanaan pembangunan hukum RPJPN Tahun 2025-2045. Selain kesinambungan dan keberlanjutan, evaluasi memberi arah agar terpenuhinya berbagai unsur sistem hukum yang menyeluruh meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum dalam kebijakan pembangunan hukum ke depan. Hal ini penting terlebih mengingat adanya perubahan dalam paradigma, model, dan pendekatan dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menggabungkan bidang pembangunan hukum dengan stabilitas (ekonomi) dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional menuntut adanya fokus lebih terhadap bidang hukum. Penguatan aspek budaya hukum, berbagai persoalan hukum, korupsi, dan masalah HAM harus dituntaskan secara terencana pada awal periode pembangunan 2025-2045. Hal ini mengingat supremasi hukum menjiwai segala aspek pembangunan lain bahkan sebagai landasan bergeraknya roda transformasi pembangunan secara nasional. Penyempurnaan dapat dilakukan dalam dokumen perencanaan turunannya seperti RPJMN dan juga dilakukan perubahan terhadap dokumen RPJPN melalui Peraturan Presiden sepanjang dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR.

Kata kunci: rencana pembangunan, pembangunan jangka panjang, pembangunan hukum.

Long-Term National Development Direction in The Field of Law (Legal Analysis of Law Number 59 of 2024 Concerning the National Long-Term Development Plan 2025—2045)

Prodigy Journal, Vol. 13 No.1, July 2025, Page

There is a change in paradigm, model, and approach in the document of RPJPN 2025-2045 compared to RPJPN 2005-2025. There are challenges related to changes in paradigm, model, and planning approach, especially in the direction of legal development. The problem and purpose of this writing is to analyze the extent of the role of the evaluation of legal development in 2005-2025 for its planning in the RPJPN 2025-2045 and critical notes on the direction of legal development in RPJPN 2025-2045. This writing uses the normative legal method. The evaluation of RPJPN 2005-2025 is the basis for the legal development planning for RPJPN 2025-2045. In addition to continuity and sustainability, evaluation provides direction for the fulfillment of various elements of a comprehensive legal system including substance, structure, and legal culture in future legal development policies. This is important especially considering the changes in paradigms, models, and approaches in RPJPN 2025-2045. The change in the development planning paradigm that combines the field of legal development with stability (economy) and Indonesia's leadership in the international world requires more focus on the legal field. Strengthening aspects of legal culture, various legal issues, corruption, and human rights issues must be resolved at the beginning of 2025-2045 development period. This is because the supremacy of law inspires other aspects of development and the foundation for national development transformation. Improvements can be made in derivative planning documents such as RPJMN and changes for RPJPN document through a Presidential Regulation after consultation with the DPR.

Keywords: development planning, long term development, legal development.

**PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

Volume 13 Nomor 1 Juli 2025

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Laily Fitriani

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Badan Keahlian DPR RI

Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi

Jurnal Prodigy, Vol. 13 No. 1 Juli 2025, hal.

Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara yang tugasnya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang “Berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, martabat serta perilaku hakim.” Dengan demikian, Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang dibentuk melalui konstitusi untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim. Kedudukan Komisi Yudisial adalah sangat penting. Secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Adapun Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa Komisi Yudisial tidak memiliki wewenang untuk mengawasi hakim MK. Pada akhirnya hadir majelis kehormatan mahkamah konstitusi mengadili hakim mahkamah konstitusi dalam pelanggaran kode etik hakim Mahkamah konstitusi. Hal ini dirasakan kurang ideal karena dalam perjalanannya seringkali hakim konstitusi masih melakukan pelanggaran etika. Permasalahan dalam tulisan ini yakni: Bagaimanakah penegakan kode etik bagi hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi? Bagaimanakah peranan Peranan Komisi Yudisial dalam Penegakan Kode Etik bagi Hakim Konstitusi? Bagaimana model penegakan kode etik bagi hakim Mahkamah Konstitusi? Adapun sejumlah permasalahan tersebut bertujuan untuk menjawab urgensi dari mengembalikan kewenangan untuk mengawasi hakim konstitusi. Tulisan ini menggunakan metode tulisan yuridis normatif. Kesimpulan yang didapatkan dari tulisan ini yakni diperlukan untuk kembali menghidupkan kewenangan dari Komisi Yudisial untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: komisi yudisial, kewenangan pengawasan, hakim mahkamah konstitusi

Authority of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia in Supervision of Constitutional Court Judges

Prodigy Journal, Vol. 13 No.1, July 2025, Page

The Judicial Commission as a state institution whose duties are related to judicial power which "has the authority to propose the appointment of Supreme Court Justices and other authorities in order to maintain and uphold the honor, dignity and behavior of judges". Thus, the Judicial Commission is a state institution formed through the constitution to carry out external supervision of judges. The position of the Judicial Commission is very important. Structurally, its position is positioned on an equal footing with the Supreme Court and the Constitutional Court. The Constitutional Court through the Constitutional Court decision No. 005/PUU-IV/2006 stated that the Judicial Commission does not have the authority to supervise Constitutional Court judges. In the end, the Constitutional Court's honorary council was present to try constitutional court judges in violations of the code of ethics of constitutional court judges. This is considered less than ideal because in its journey, constitutional judges often still commit ethical violations. The problems in this article are: How is the enforcement of the code of ethics for constitutional judges in the Constitutional Court? What is the role of the Judicial Commission in Enforcing the Code of Ethics for Constitutional Judges? What is the model for enforcing the code of ethics for Constitutional Court judges? A number of these problems aim to answer the urgency of returning the authority to supervise constitutional judges. This article uses the normative legal writing method. The conclusion drawn from this article is that it is necessary to revive the authority of the Judicial Commission to supervise the Constitutional Court.

Keywords: *judicial commission, supervisory authority, constitutional court judge*

**PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

Volume 13 Nomor 1 Juli 2025

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Laksmi Harundani

Perancang Peraturan Peundang-undangan Ahli Madya, Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Keahlian DPR RI

Kebijakan Pembatasan Kepemilikan Rumah Untuk Keadilan Masyarakat

Jurnal Prodigy, Vol. 13 No. 1 Juli 2025, hal.

Jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah dan arus urbanisasi terus meningkat. Wilayah perkotaan menjadi sangat padat, kebutuhan rumah semakin meningkat namun luas tanah tidak bertambah. Banyak dari masyarakat terutama di wilayah perkotaan tidak dapat membeli rumah dikarenakan harganya yang sangat tinggi. Sebagai hak warga negara memperoleh hunian yang layak maka pemerintah harus membuat kebijakan yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat agar dapat memiliki hunian yang layak. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana alternatif kebijakan pembatasan kepemilikan rumah di Indonesia dan bagaimanakah pengaruh kebijakan pembatasan kepemilikan rumah terhadap pasar properti serta apakah efektif dalam mengatasi ketersediaan rumah dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui alternatif kebijakan pembatasan kepemilikan rumah di Indonesia dan untuk mengetahui pengaruh kebijakan pembatasan kepemilikan rumah terhadap pasar properti serta apakah akan efektif dalam mengatasi ketersediaan rumah dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Penulisan menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban dalam menyediakan rumah bagi masyarakat dan pemerintah dapat membuat berbagai kebijakan untuk mengontrol harga rumah dengan menerapkan pembatasan kepemilikan rumah dan menerapkan pajak progresif. Pilihan kebijakan tersebut dapat mempengaruhi harga rumah khusus di wilayah perkotaan namun juga dapat mempengaruhi bisnis properti apabila pemerintah tidak dapat membuat regulasi yang tepat. Untuk menerapkan kebijakan pemerintah tersebut, pemerintah harus mempertimbangkan memasukkan regulasi tersebut dalam undang-undang namun harus memperhatikan pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata kunci: kepemilikan, pembatasan, rumah

Policy of Home Ownership Restrictions for Social Justice

Prodigy Journal, Vol. 13 No.1, July 2025, Page

The population of Indonesia is increasing and the flow of urbanization continues to increase. Urban areas are becoming very dense, the need for housing is increasing but the land area is not increasing. Many people, especially in urban areas, cannot buy houses because the prices are very high. As a citizen's right to obtain decent housing, the government must make fair and equal policies for all people so that they can have decent housing. The problem in this paper is how are the alternative policies for limiting home ownership in Indonesia and how does the policy of limiting home ownership affect the property market and whether it is effective in overcoming the availability of affordable housing for the community. The purpose of this paper is to find out alternative policies for limiting home ownership in Indonesia and to find out the effect of the policy of limiting home ownership on the property market and whether it will be effective in overcoming the availability of affordable housing for the community. The research in this article uses a type of normative research with a comparative approach. The results of the analysis show that the government is obliged to provide housing for the society and the government can make various policies to control house prices by implementing restrictions on home ownership and implementing progressive taxes. These policy options can affect house prices specifically in urban areas but can also affect the property business if the government cannot make the right regulations. In order to implement this government policy, the government must consider including this regulation in law but must pay attention to its conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: ownership, restrictions, house

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

Volume 13 Nomor 1 Juli 2025

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Hendra Martadiredja

Staf Pengkajian MPR RI

Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah Tidak Langsung dalam Perubahan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah

Jurnal Prodigy, Vol. 13 No. 1 Juli 2025, hal.

Pemilihan kepala daerah salah satu bentuk demokrasi di daerah untuk memilih gubernur, walikota/bupati, selama ini telah memiliki dua model pemilihan yaitu pemilihan kepala daerah secara langsung dan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Model pemilihan yang sekarang ada di Indonesia adalah pemilihan langsung, tetapi banyak masalah dan dampak negatif yang muncul dari model ini sehingga muncul ide dan gagasan untuk mengubah model pemilihan kepala daerah dari langsung kembali ke tidak langsung. Permasalahan dalam tulisan ini yakni bagaimanakah dinamika pengaturan dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pilkada pada ini? mengapa Pilkada langsung yang berlaku saat ini ingin diubah kembali menjadi Pilkada tidak langsung? bagaimanakah perubahan undang-undang pemilihan kepala daerah dapat berdampak terhadap demokrasi di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemilihan kepala daerah langsung dalam Perspektif ketatanegaraan dan bagaimana pemilihan kepala daerah tidak langsung dalam Perspektif ketatanegaraan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian normatif atau penelitian pustaka yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki banyak masalah sehingga perlu penataan kembali mekanismenya, membenahi regulasinya, membangun integritas dan perilaku penyelenggaraan Pilkada. Pilkada perwakilan tidak bertentangan dengan konstitusi dalam pasal 18 ayat (4) di konstitusi kita bahwa kepala daerah di pilih secara demokratis, pilkada perwakilan bisa meminimalisir masalah-masalah yang muncul dari pilkada langsung. Akan tetapi perlu tetap diwaspadai jika mengembalikan Pilkada menjadi tidak langsung pada kondisi saat ini karena Pilkada dan Pemilu sudah dalam rezim yang sama dan tidak berbeda lagi.

Kata Kunci: pemilihan kepala daerah; pemilihan tidak langsung; pemilihan langsung

Policy on Indirect Regional Head Elections in the Amendment to the Law on Regional Head Elections

Prodigy Journal, Vol. 13 No.1, July 2025, Page

Regional head elections are one form of democracy in the regions to elect governors, mayors / regents, so far there have been two election models, namely the direct election of regional heads and the indirect election of regional heads. The current election model in Indonesia is direct election, but many problems and negative impacts arise from this model so that ideas and ideas arise to change the regional head election model from direct back to indirect. The problems in this paper are how are the regulatory dynamics in the legislation regarding the implementation of regional elections at this time? why do direct elections that currently apply want to be changed back to indirect elections? How changes in regional head election laws can have an impact on democracy in Indonesia? The purpose of this study is to find out how direct regional head elections in the constitutional perspective and how indirect regional head elections in the constitutional perspective. The research method uses normative research or library research related to legislation. The results of this study indicate that the direct election of regional heads has many problems so it is necessary to rearrange the mechanism, fix the regulations, build the integrity and behavior of organizing the elections. Representative elections do not contradict the constitution in article 18 paragraph (4) in our constitution that regional heads are democratically elected, representative elections can minimize the problems that arise from direct elections. However, it is necessary to remain vigilant if returning the elections to indirect elections in the current conditions because the elections and elections are already in the same regime and are no longer different.

Keywords: regional head election; indirect election; direct election

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

Volume 13 Nomor 1 Juli 2025

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Imaduddin

Peneliti LPPSP FISIP UI

Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Jurnal Prodigy, Vol. 13 No. 1 Juli 2025, hal.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sejatinya memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara dari kerugian yang diderita karena risiko kecelakaan lalu lintas. Kurang lebih 60 (enam puluh) tahun undang-undang tersebut berlaku dan dalam perjalanannya ternyata masih banyak hal yang belum dapat terakomodir sebagai wujud suatu sistem jaminan sosial yang diberikan oleh negara, sehingga perlu adanya perubahan undang-undang. Permasalahan dalam tulisan ini yakni Bagaimanakah urgensi perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dilakukan, dan apakah yang perlu diubah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui urgensi UU No. 34 Tahun 1964 dan untuk mengetahui hal yang perlu diubah dalam UU No. 34 Tahun 1964. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Pada akhirnya tulisan ini berpendapat bahwa kebutuhan terhadap pengelolaan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan lalu lintas terus mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan mobilitas masyarakat. Di satu sisi kedudukan PT Jasa Raharja sebagai leading asuransi kecelakaan secara legitimasi hukum masih lemah. Hal tersebut tercermin dari tumpang tindihnya kedudukan PT Jasa Raharja apakah lembaga asuransi, instansi pemerintah, atau perusahaan negara. Selain itu santunan yang diperoleh masyarakat telah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini, karena santunan yang ada saat ini tergerus oleh inflasi. Untuk itu diperlukan suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi jawaban konkrit atas permasalahan yang selama ini melalui perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.

Kata Kunci: kecelakaan, perubahan undang-undang, asuransi

Urgency of Changing Law Number 34 Year 1964 Concerning Mandatory Road Traffic Accident Insurance Funds

Prodigy Journal, Vol. 13 No.1, July 2025, Page

Law Number 34 Year 1964 concerning the Compulsory Road Traffic Accident Insurance Fund actually has the intention and purpose to provide protection for all citizens from losses suffered due to the risk of traffic accidents. The law has been in effect for approximately 60 (sixty) years and along the way it has become clear that there are still many things that cannot be accommodated as a form of social security system provided by the state, so that there needs to be a change in the law. The problem in this paper is how urgent is the amendment to Law Number 34 Year 1964, and what needs to be changed in Law Number 34 Year 1964. The purpose of this paper is to find out the urgency of Law Number 34 Year 1964 and to find out what needs to be changed in Law Number 34 Year 1964. This paper uses a normative legal method. In the end, this paper argues that the need for the management of mandatory passenger and traffic accident insurance funds continues to develop along with the increasing number of motorized vehicles and community mobility. On the one hand, the position of PT Jasa Raharja as a leading accident insurance in terms of legal legitimacy is still weak. This is reflected in the overlapping positions of PT Jasa Raharja, whether it is an insurance institution, government agency, or state-owned company. In addition, the compensation received by the community is no longer in accordance with current economic conditions, because the existing compensation is eroded by inflation. For this reason, a set of laws and regulations is needed that can be a concrete answer to the problems that have been through the amendment of Law Number 34 Year 1964.

Keywords: accidents, changes in laws, insurance

**PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

Volume 13 Nomor 1 Juli 2025

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Imron Razali

Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau

Urgensi Perubahan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Melakukan Penyesuaian dengan Perkembangan Hukum dan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan

Jurnal Prodigy, Vol. 13 No. 1 Juli 2025, hal.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung berkaitan dengan persoalan administrasi Negara. PTUN diatur utamanya diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU tentang PTUN). Adapun dalam perjalanannya UU tentang PTUN ini perlu untuk diubah agar dapat mengikuti perkembangan dinamika sengketa tata usaha negara, terutama setelah kompetensi absolut diperluas oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU tentang AP). Permasalahan dalam tulisan ini yakni bagaimanakah arah perubahan UU tentang PTUN yang dapat mengikuti perkembangan dinamika sengketa tata usaha negara, terutama setelah kompetensi absolut diperluas oleh UU tentang AP? Bagaimanakah dampak akses keadilan bagi masyarakat yang didapat melalui perubahan UU tentang PTUN? tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjawab kedua permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normative. Melalui tulisan ini dapat diketahui bahwa bahwa peraturan perundang-undangan mengenai PTUN yang ada saat ini, dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Perluasan kompetensi absolut PTUN setelah ada UU tentang AP, diikuti dengan penerbitan Perma yang bertujuan memberi pedoman berperkara bagi pihak pencari keadilan dan Hakim, serta memberi kepastian hukum dalam hal penegakan hukum administrasi negara. Perluasan kompetensi absolut PTUN telah memberi akses keadilan yang lebih banyak. Akses keadilan yang ada dapat lebih diperluas dengan memberi pengaturan tentang mekanisme gugatan citizen lawsuit, sehingga masyarakat dapat memilih melakukan upaya penegakan dan perlindungan hak sebagai warga negara.

Kata Kunci: perubahan, peradilan tata usaha negara, akses keadilan

The Urgency of Changes in the Law about State Administrative Jurisdiction by Making Adjustments to Legal Developments and Laws Concerning Government Administration

Prodigy Journal, Vol. 13 No.1, July 2025, Page

The State Administrative Court (PTUN) is one of the judicial bodies under the Supreme Court related to state administration issues. PTUN is mainly regulated by Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts (Law of PTUN). In its journey, the Law of PTUN needs to be amended in order to be able to follow the development of the dynamics of state administrative disputes, especially after absolute competence was expanded by Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration (Law of AP). The problem in this paper is how is the direction of changes to the Law of PTUN that can follow the development of the dynamics of state administrative disputes, especially after absolute competence was expanded by the Law of AP? What is the impact of access to justice for the community obtained through changes to the Law of PTUN? The purpose of this paper is to answer both of these problems. The research method used is normative. Through this paper, it can be seen that the current laws and regulations regarding PTUN can follow developments in society. The expansion of the absolute competence of the PTUN after the Law of AP, followed by the issuance of a Perma which aims to provide guidelines for litigation for parties seeking justice and Judges, as well as providing legal certainty in terms of enforcing state administrative law. The expansion of the absolute competence of the PTUN has provided greater access to justice. The existing access to justice can be further expanded by providing regulations on the mechanism for citizen lawsuits, so that the public can choose to make efforts to enforce and protect their rights as citizens.

Keywords: reformulation, the state administrative court, access to justice

**PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

Volume 13 Nomor 1 Juli 2025

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Dyah Pitaloka

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Analisis Yuridis Pemenuhan dan Perlindungan Hak Orang Lanjut Usia

Jurnal Prodigy, Vol. 13 No. 1 Juli 2025, hal.

Indonesia saat ini sedang mengalami bonus demografi, populasi penduduk kita akan mengalami penuaan dimana usia produktif jumlahnya akan menurun pada 2035-2040 dan penduduk lansia akan membesar jumlahnya. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah bentuk kesejahteraan lansia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hal-hal apa saja yang perlu diatur dalam perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia (UU tentang Kesejahteraan Lansia) dalam rangka merespon berbagai isu strategis tentang kesejahteraan lanjut usia (lansia). Tulisan ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Menurut penulis, bentuk kesejahteraan Lansia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya dalam bentuk undang-undang dan peraturan teknis. Terdapat dua alasan perlunya dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lansia yaitu *pertama*, dari sisi teknis penyusunan perundang-undangan dan *kedua*, substansi yaitu penyesuaian mengenai batasan lanjut usia, perlindungan bagi lanjut usia mencakup terpenuhinya hak-hak lansia pada semua aspek kehidupan, baik materiil maupun moril, dan perubahan Undang-Undang tentang Lansia harus menggunakan pendekatan hak (*rightbased approach*).

Kata kunci: lanjut usia, hak, kesejahteraan.

Juridical Analysis of Fulfillment and Protection of the Rights of Elderly People

Prodigy Journal, Vol. 13 No.1, July 2025, Page

Indonesia is currently experiencing a demographic bonus, our population will experience aging where the number of productive age will decrease in 2035-2040 and the elderly population will increase in number. The problem in this paper is what forms of elderly welfare are regulated in statutory regulations and what things need to be regulated in changes to the Law Number 13 of 1998 concerning the Welfare of the Elderly in order to respond to various strategic issues regarding elderly welfare. This article was prepared using a normative juridical approach research method using a statutory regulation approach. According to the author forms of elderly welfare regulated in statutory regulations include laws and technical regulations. There are two reasons for the need to make changes to the Law on the Elderly, namely first, from the technical side of drafting the legislation and second, the substance, namely adjustments to the boundaries of the elderly, protection for the elderly includes the fulfillment of the rights of the elderly in all aspects of life, both material and material. and morals, and changes to the Law on the Elderly must use a rights approach.

Key words: *elderly, rights, welfare.*

